

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti memiliki visi misi serta tujuannya masing-masing, baik dalam ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik serta tujuan lainnya. Untuk mencapai suatu tujuan negaranya tersebut, dibutuhkan kerjasama baik di ranah internasional maupun nasional. Namun, dalam menjalani kerjasama, adanya perjanjian-perjanjian yang disepakati antar negara. Karena setiap negara memiliki tujuan yang berbeda. Hubungan internasional menjadikan tiap tiap negara mempermudah dalam mencapai tujuannya.

Menurut Coulombis mengungkapkan bahwa Hubungan internasional yakni suatu ilmu yang mempelajari sebuah pola-pola aksi dan reaksi diantara negara-negara berdaulat yang dimana perilaku elit pemerintah merupakan indikatornya (BITAR 2021). Serta menurut J.C. Johari Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang terjadi di antara negara-negara berdaulat. Namun tidak hanya hubungan antar negara, hubungan internasional juga berkaitan dengan pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap kondisi politik negara lain maupun politik secara global.

Amerika Serikat merupakan negara Republik Konstitusional Federal dan juga salah satu negara yang paling multietnik dan paling multicultural di dunia yang muncul akibat adanya imigrasi besar – besaran dari berbagai penjuru dunia. Amerika Serikat terbentuk dari Tiga Belas Koloni Inggris yang membentang di sepanjang pesisir Atlantik, yang mengembangkan sistem ekonomi dan sistem

politik demokratis tersendiri yang terpisah dari Inggris. Perselisihan antara Inggris dan para kolonis Amerika menyebabkan pecahnya Revolusi Amerika.

Pada tanggal 4 Juli 1776 dengan suara bulat, delegasi dari 13 koloni Inggris memproklamkan kemerdekaan, yang menjadi awal berdirinya Amerika Serikat. Perekonomian nasional Amerika Serikat merupakan perekonomian termaju di dunia. Kemenangannya dalam Perang Dunia I semakin mempertegas status Amerika Serikat sebagai kekuatan militer dunia. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai negara Super Power (Adidaya) baru di dunia dan menjadi negara pertama yang mengembangkan senjata nuklir dan menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia (Globaloneworld n.d.)

Amerika Serta dan Uni Soviet merupakan negara Adidaya didunia, namun setelah setelah Perang Dingin usai Uni Soviet berhasil dikalahkan oleh Amerika Serikat. Melihat kembali sejahrahnya dua negara tersebut, Amerika Serikat merupakan negara penganut demokrasi sedangkan Uni Soviet merupakan negara penganut komunis. Terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, menyebabkan adanya perbedaan ideologi di Korea yang berakhir dengan perpecahan antara Korea Selatan sebagai negara ekonomi industri kapitalis dan Korea Utara sebagai negara militer komunis.

Pada saat itu ketika akan menduduki Korea, Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki pemikiran yang berbeda. Soviet ingin memperluas lingkup pengaruh komunis ke Korea. Amerika Serikat membalas dengan mendorong pembentukan demokrasi. Selain itu, Amerika Serikat menekankan pentingnya penahanan, yaitu kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mencegah penyebaran komunisme.

Ketidak sepakatan ini pada akhirnya akan menyebabkan Perang Korea. Perang Korea adalah pertempuran pertama Perang Dingin, dan perang proksi besar pertama terjadi antara Amerika Serikat dan musuh yang didukung komunis Soviet.

Melihat kembali ke sejarah, bahwasanya dahulu Korea Utara terbentuk setelah Perang Dunia II, di awal Perang Dingin antara Blok Barat pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet. Sejak 1910 hingga kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II pada 1945, seluruh Semenanjung Korea telah dicaplok dan diduduki oleh pasukan Jepang. Di tengah ketidaksepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Semenanjung Korea terpecah. Terbagi menjadi wilayah Utara di bawah pengelolaan Uni Soviet, yang kemudian wilayah Selatan yang diperintah Amerika Serikat.

Uni Soviet mulai melancarkan serangan dan menduduki wilayah itu pada tanggal 12 Agustus 1945. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat baru mendarat di Korea bagian selatan pada bulan September 1945. Dengan demikian, mulai saat itu wilayah Korea diduduki dua negara adidaya, Amerika Serikat di selatan dan Uni Soviet di utara. Presiden pertama Republik Korea adalah Dr. Syngman Rhee. Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) pada tanggal 1 Mei 1948. Uni Soviet mengangkat Kim Il Sung sebagai presidennya. Uni Soviet baru meninggalkan Korea Utara setelah menandatangani perjanjian tentang pemberian bantuan ekonomi, militer, dan teknologi pada negara satelitnya itu. Korea Utara juga menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan demikian, makin kukuh kekuatan komunis di Asia (SYEKHNURJATI n.d.)

Pada 9 September 1948, Republik Demokratik Rakyat Korea lahir di wilayah Utara, dipimpin oleh anggota Partai Pekerja Korea dan mantan pejuang gerilya Kim Il Sung. Atas dukungan penuh Uni Soviet, Kim Il-sung memegang kekuatan politik

dan memperkokoh posisinya sebagai pemimpin partai komunis Chosun yang baru dibentuk di bagian Utara. Pada tahun 1946, organisasi itu dibentuk kembali sebagai Partai Buruh Korea Utara. Badan politik itu memperkokoh landasan sebagai negara komunis, lewat pelaksanaan nasionalisasi tanah pertanian.

Pembagian Semenanjung Korea diakibatkan oleh berbagai faktor secara bersama-sama termasuk pro dan kontra mengenai penetapan perwakilan Korea di bawah PBB, pertentangan antara sayap kiri dan kanan, dan suasana ketegangan perang dingin yang mendominasi Semenanjung Korea. Namun, sebelumnya telah ada rencana untuk menyatukan kembali Korea antara Korea Selatan dengan Korea Utara pada tahun 1949 atau setelah mundurnya tentara Uni Soviet pada tahun 1948. Tetapi sebelum agenda itu di lakukan, pada tahun 1948 rezim Syngman Rhee atau Presiden Korea Selatan saat itu bersamaan dengan adanya dukungan militer dari Amerika Serikat serta pemberontakan menjadikan rencana penyatuan Korea tidak dapat dilakukan. Seperti diketahui bahwa presiden Korea Selatan Syngman Rhee adalah seseorang yang dikenal sebagai anti komunis. Sedangkan Korea Utara adalah negara penganut Komunis karena dibawah dukungan negara aliansinya yaitu Uni Soviet yang terkenal akan negara komunisnya juga.

Dibawah pengawasan PBB, pemilihan demokrasi diadakan di bagian Selatan (Korea Selatan) serta Amerika Serikat mulai tahun 1948 banyak yang ditarik pulang ke negerinya. Hanya para penasihat militer dalam jumlah kecil yang ditinggalkan di tempat itu. Hal itu berkaitan dengan mulai terbentuknya pemerintahan dan berdirinya Korea Selatan yakni Republik Of Korea secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1948 dan pusat pemerintahannya ditempatkan di Seoul.

Maka Semenanjung Korea terbagi dua secara sempurna. Namun pada tahun 1950 tepatnya pada tanggal 25 Juni perang Korea terjadi yaitu perang antara Korea

Selatan dengan Korea Utara yang bermula konflik perbatasan pada pararel utara ke-38 atau pada Zona Demiliterisasi serta upaya bernegosiasi Korea kembali bersatu yang gagal. Sejak saat itu hingga sekarang, Korea Selatan dengan Korea Utara selalu melakukan upaya penyerangan demi saling melindungi negaranya.

Korea Utara dengan penganut komunisnya menjadikan Hak Asasi Manusia nya berbeda dengan Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara termasuk di antara yang paling represif di dunia, dan hampir tidak menghormati hak asasi manusia apa pun. Pyongyang mengingkari kebebasan informasi, berserikat, beragama, oposisi politik yang terorganisir, dan aktivisme buruh oleh warganya. Rezim menangkap dan menyiksa mereka secara sewenang-wenang dan menjalankan kamp penjara skala besar bagi mereka yang dituduh melakukan pelanggaran politik. Orang Korea Utara sering disebut sebagai "orang yang paling diperlakukan brutal di dunia", sebab beberapa batas yang ketat diletakkan di atas kebebasan politik dan ekonomi mereka (Seok n.d.).

Selain itu, sebagai negara yang sangat tertutup Korea Utara menerapkan sejumlah aturan yang cukup ketat untuk warga negaranya. Adanya hukuman 3 generasi bagi seseorang yang melakukan kejahatan dan dijebloskan kepenjara serta keluarganya pun akan dipenjara bersama. Meski memiliki akses internet namun sangat dibatasi dan kurang dari satu persen populasi yang menggunakannya. Larangan meninggalkan Korea Utara tanpa izin, kontrol perbatasan yang ketat di Korea Utara membuat warganya sangat sulit meninggalkan negara itu. Siapa pun yang tertangkap melakukannya dapat dikirim ke kamp kerja paksa atau bahkan dieksekusi serta larangan melakukan panggilan telepon internasional yang akan dihukum mati jika ketahuan ada yang melanggar (Kompas.com, aditya jaya 2020)

Berbeda dengan Korea Utara, Hak Asasi Manusia dan kebebasan warga negara Korea Selatan lebih memiliki hak dan kebebasan yang bisa dilakukan warganya. Hampir setengah dari seluruh populasi di Korea Selatan tidak menganut agama apapun. Berbeda dengan Korea Utara dimana meski mengizinkan adanya kebebasan beragama, namun praktiknya sangat berbeda yaitu Alkitab dianggap ilegal karena umat Kristiani tidak benar-benar diterima bahkan siapa pun yang mempraktikannya akan ditangkap dan dijebloskan ke kamp kerja paksa. Selain itu Korea Selatan memiliki kebebasan dalam berpakaian dan juga Central Intelligence Agency (CIA) menganggap Korea Selatan sebagai demokrasi modern yang berfungsi penuh, dan juga budaya yang populer Korea Selatan melalui K-pop, drama TV berperan sebagai kekuatan lunak yang sedang meningkat di dunia (STREPHONSAYS n.d.)

Sudah sering terjadi adanya warga Korea Utara yang kabur dari negara dikarenakan ketidakadilan pemerintahnya terhadap warga negaranya. Korea Selatan serta Cina menjadi banyaknya warga Korea Utara yang kabur ke negara tersebut. Karena pemerintahan diktator komunis di Korea Utara, banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan, perkosaan, penyiksaan, kerja paksa, dan lebih dari 200.000 tahanan politik yang dilaporkan tanpa pandang bulu. Banyak orang Korea Utara yang telah menyeberang ke Cina untuk menghindari penindasan dan kelaparan.

Selain dalam segi Hak Asasi Manusia yang berbeda antara Korea Utara dengan Korea Selatan, kedua negara tersebut memiliki banyak perbedaan lainnya salah satunya dalam segi ekonomi. Terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada saat itu, menyebabkan adanya perbedaan ideologi

di Korea yang berakhir dengan perpecahan antara Korea Selatan sebagai negara ekonomi industri kapitalis dan Korea Utara sebagai negara militer komunis.

Saat ini, Korea Selatan dikenal sebagai 'Macan Asia' dengan perekonomian yang sudah sangat mapan dan terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar yang disegani dunia dengan kecanggihan teknologinya. Bahkan perekonomian di Korea Selatan sudah tergolong ke dalam perekonomian negara maju di mana mereka sudah menjadi produsen kelas atas. Hal tersebut terjadi karena institusi ekonomi di Korea Selatan mendorong adanya investasi dan perdagangan global.

Selain kemajuan akan kecanggihan teknologinya, Korea Selatan memiliki sistem ekonomi pasar yang bebas (liberal) dimana adanya perlindungan atas hak milik dalam pasar yang relatif bebas di Korea Selatan memberikan insentif terhadap individu untuk melakukan inovasi dalam berwirausaha dalam bentuk profit, juga dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan menjadi lebih sehat. Lalu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia meski kurangnya sumber daya alam yang dimiliki. Dalam buku yang ditulis oleh Daron Acemolu dan James A. Robinson yang berjudul "*Why Nation Fail*", disebutkan bahwa Korea Selatan dapat maju karena dua hal, yaitu institusi ekonomi yang inklusif serta investasi di bidang pendidikan. Selain kagum dengan perekonomian maupun industri hiburannya yang bertaraf internasional. Pengenalan budaya, sejarah, hingga pariwisata melalui Korean Wave juga menjadi daya tarik tersendiri Korea Selatan (FUNCREV YOURSAY.ID 2021)

Pada Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Utara hanya 40\$ billion sedangkan Korea Selatan lebih besar yaitu 2.241\$ billion. Dan untuk PDB perkapita Korea Selatan sebesar 43.212.00\$ sedangkan Korea Utara 1.800.00\$ perkapita. Tingkat pertumbuhan PDB RIIL nya pun dua negara tersebut berbeda, Korea Selatan

sebesar 3.1% sedangkan Korea Utara -1.1%. Tingkat pengangguran pun lebih besar di Korea Utara sebesar 25.6% dari populasi warganya sedangkan Korea Selatan hanya 3.7%. Untuk tarif standar pajak (PPN) pun Korea Utara lebih kecil dibandingkan dengan Korea Selatan yaitu hanya 4% sedangkan Korea Selatan sebesar 10% (Versus n.d.)

Meski saat ini telah dijuluki sebagai Macan Asia, namun Korea selatan pernah mengalami kemiskinan besar usai terjadinya perang saudara. PBB sampai menyarankan Korea Selatan untuk meniru negara Kenya agar bisa terlepas dari kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Korea Selatan yang mampu menerima masukan akan pendapat, menjadikannya negaranya mengalami perubahan yang baik. Sedangkan Korea Selatan yang gigih akan ideologinya serta tertutup, menjadikan negaranya susah menerima masukan dari siapa pun.

Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un, membuat keputusan kebijakan untuk menutup Kawasan Industri Kaesong yang merupakan industri hasil kerjasama Korea Utara dan Korea Selatan pada 3 April 2013. Penutupan Kaesong ini merupakan reaksi keras atas kebuntuan sikap terhadap Washington dan Seoul yang telah menggelar latihan perang bersama di Semenanjung Korea selama sebulan. Korea Utara juga marah terhadap media Korea Selatan dan para analis yang mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan berani menutup Kaesong yang menjadi sumber penting devisa negara. Menurut pengamat urusan Korea Utara, pihaknya tidak dapat mencegah kemungkinan Korea Utara untuk mengambil tindakan ekstrim dalam hubungannya dengan Korea Selatan, meskipun ada pandangan lain, bahwa Korea Utara sulit untuk menghentikan Proyek Kompleks Industri Korea Selatan di kota Kaesong Korea Utara, yang selama ini berperan sebagai simbol pembukaan pintu Korea (Farid Arpan 2018)

Namun dewasa ini energi nuklir lebih digunakan untuk dijadikan sebagai ancaman suatu negara kepada negara lain. Seperti diketahui Perkembangan teknologi nuklir Korea Utara terus meningkat dan mulai menjadi perhatian serius bagi negara dikawasan Asia Timur, negara barat dan Amerika Serikat (AS). Berawal dari bergabungnya Korea Utara dengan NPT atas tekanan Uni Soviet dibawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, tekanan terhadap kebijakan nuklir Korea Utara terus terjadi. Pada tahun 1991, Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk menghentikan program nuklir nya dan mengancam akan melakukan serangan fasilitas nuklir Korea Utara jika program pengembangan teknologi nuklir tidak dihentikan. Korea Utara secara rahasia ternyata tetap melanjutkan proyek pembangunan teknologi nuklirnya.

Korea Utara didorong untuk bergabung dengan Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) setelah melaksanakan uji coba rudal Scud-B pada April 1984. Uji coba ini juga memaksa Korea Utara untuk tidak menyebarkan nuklir lewat ancaman Uni Soviet melalui Mikhail Gorbachev yang mengatakan akan menghentikan bantuan ekonomi bila Korea Utara tidak menandatangani perjanjian NPT tersebut. Bergabung dengan NPT tidak membuat Korea Utara merasa nyaman karena merasa pengembangan teknologi nuklirnya terus diawasi dan dibatasi.

Tingkat kerjasama dan ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet sangat tinggi sehingga disaat Uni Soviet bubar pada 26 Desember 1991 memberikan dampak langsung terhadap Korea Utara. Keterpurukan ekonomi mulai dirasakan dalam tubuh Korea Utara itu sendiri, selain itu Korea Utara juga harus membuat kebijakan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Dimana pada tahun 1991 itu adalah akhir dari pemerintahan Kim Il Sung, dan masa transisi ke pemerintahan Kim Jong Il. Dengan runtuhnya Uni Soviet Korea Utara harus

merubah kebijakannya dari kebijakan yang berbasis ekonomi kepada kebijakan yang berbasis militer untuk menjaga keutuhan negaranya karena pada saat itu penopang Negara-negara komunis (Uni Soviet) sudah tidak ada (DARWIS NASUTION 2018)

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari NPT (Perjanjian non-proliferasi nuklir) pada tahun 1993. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan IAEA (Badan tenaga atom internasional) pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti yang mencurigakan bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak, karena ada selisih sebanyak 90 gram dari yang dilaporkan oleh Korea Utara pada awalnya. Dengan hasil itu IAEA segera meminta pelaksanaan inspeksi khusus, namun Korea Utara menolak permintaan itu dan menarik diri dari NPT sebagai aksi protes.

Hampir setahun penuh negosiasi dilakukan namun gagal, kemudian konflik tentang masalah nuklir Korea itu sempat membawa krisis yang hampir menyebabkan terjadinya perang pada Juni 1994. Pertemuan dibuka kembali setelah kunjungan dramatis oleh mantan presiden Amerika Serikat Carter, yang mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara ketika itu, Kim Il-sung. Negosiasi Amerika Serikat dan Korea Utara dilanjutkan dengan mencapai perjanjian Jenewa pada Oktober 1994 yang diikuti oleh duta besar Amerika Serikat urusan nuklir, Robert Gallucci dan wakil menteri Deplu Korea Utara, Kang Suk-ju.

Persetujuan bersyarat dibuat, Korea Utara akan menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya akan menerima minyak solar dan reaktor air ringan, hingga secara efektif menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara putaran

pertama. Walaupun Perjanjian Jenewa tercapai setelah kematian Kim Il sung, namun hal itu bermakna bahwa kerangka dasar untuk hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat terbentuk dalam masa akhir 'Era Kim Il-sung'.

Sampai saat ini Korea Utara telah berhasil melakukan 6 kali uji coba senjata nuklir yang mana pada September 2017 merupakan uji coba nuklir terkuat yang dimiliki Korea Utara dengan daya ledak 10 dan 30 kiloton. Agustus 2017 lalu, Defense Intelligence Agency mengemukakan Korea Utara akhirnya berhasil membuat hulu ledak nuklir yang dapat dimuat ke dalam rudal balistik dan dapat diluncurkan tergantung pada kemampuan jarak rudal balistiknya. Hal tersebut merupakan ancaman serius mengingat rudal balistik antar benua dapat dipandang sebagai fase terakhir dalam proyeksi kekuatan suatu negara, karena memungkinkan negara tersebut melancarkan serangan berat terhadap negara lain.

Sebab Korea Utara mempertahankan dan menguatkan senjata nuklirnya hingga saat ini yaitu, bagi Korea Utara selain dapat menjadikan negara tersebut unggul dari Korea Selatan, nuklir juga dianggap dapat meningkatkan nilai tawar ditengah negara-negara dunia serta menjadi sumber keamanan baik bagi pemerintahan saat itu maupun hingga masa pemerintahan yang akan datang. Uji coba nuklir dimaknai Korea Utara sebagai alat negaranya untuk memperkuat posisi Korea Utara di sistem internasional. Serta Korea Utara menganggap bahwa dengan memiliki senjata nuklir akan membuat negaranya menjadi lebih kuat dari Korea Selatan bahkan dari negara lainnya.

Korea utara telah mempelajari senjata nuklir sejak tahun 90-an dan sekarang mereka sedang mengembangkan rudal yang mampu mengirimkan muatan nuklir ke mana saja di benua Amerika Serikat. Bahkan China telah menuntut korea utara menghentikan penelitian ini tetapi mereka melanjutkan, mengklaim jika mereka

tidak memiliki senjata nuklir untuk menghalangi Amerika Serikat, mereka akan diserang dan direklamasi oleh Korea Selatan.

Kim Jong Un sebagai presiden Korea Utara mengumumkan bahwasanya rudal antar benua yang mereka miliki bisa mencapai tempat manapun di dunia. Dari pernyataan itulah muncul ketegangan bagi negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta khususnya Amerika Serikat yang lantas menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara yaitu berupa sanksi Embargo Ekonomi. Yang mana seperti yang diketahui bahwa Sanksi Embargo adalah larangan yang dikeluarkan pemerintah suatu negara untuk melakukan impor atau ekspor barang tertentu ke negara lain terhadap negara yang diembargo yang akan sangat menentukan atau berdampak pada ekonomi negara tersebut, seperti halnya yang terjadi pada Korea Utara akibat tindakan yang melanggar.

Tidak hanya Amerika Serikat saja yang merasa bahwa tindakan Korea Utara adalah sebuah ancaman besar, melainkan negara lainnya pun ikut merasa adanya kekhawatiran atas tindakan nuklir Korea Utara tersebut. Beberapa negara pun ikut merespon tindakan tersebut seperti Cina dan Rusia yang mana mulai bekerja sama menggelar latihan simulasi Komputer Anti Serangan Misil Korea Utara atau Aerospace Security 2017. Dimana pengamat militer di Beijing mengatakan latihan tersebut digelar untuk memberi pesan kepada Korea Utara bahwa negara mereka siap menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Jepang diketahui membeli paket *Aegis Ashore*, yang merupakan sistem antimisil, sedangkan Korea Selatan telah membeli paket sistem pertahanan antirudal *Terminal High Altitude Area Defence* (THAAD) dari AS (Reza, Duniatempo 2017)

Sebelum diberlakukannya sanksi pada tanggal 11 September 2017, PBB pun sempat menjatuhkan hukuman sanksi kepada Korea Utara akibat perkembangan

senjata nuklirnya. Namun, sanksi yang dijatuhkan PBB tidak membuat Korea Utara menghentikan perkembangan senjata nuklirnya tersebut. Sehingga ketika Korea Utara meluncurkan uji coba rudal antar benuanya, PBB dengan sigap menyikapi tindakan membahayaan yang dilakukan Korea Utara dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada sebelumnya. Dimana sanksi tersebut diusulkan langsung oleh negara musuh Korea Utara yaitu Amerika Serikat yang mana merupakan bagian dari negara PBB yang mampu mengusulkan sanksi yang akan diberikan kepada Korea Utara.

Selain sanksi dari Amerika Serikat dan PBB, sanksi juga ditetapkan Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Sanksi termasuk pembatasan transaksi keuangan khususnya dengan pejabat dan entitas Korea Utara, serta larangan bepergian yang diberlakukan bagi pejabat pemerintah Korea Utara (HumanRightWatch 2018)

Akibat dari sanksi yang diterima Korea Utara mengakibatkan penurunan ekonomi negaranya. Dimana batu bara yang merupakan pendapatan terbesar Korea Utara menjadi sangat anjlok akibat diberlakukannya sanksi yang salah satunya adanya larangan untuk mengekspor komoditas hasil tambangnya. Barang-barang Korea Utara yang bakal disetop untuk ekspor adalah batu bara, besi, bijih besi, timah, dan biji timah. Ada pula ikan dan hasil laut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Amerika Serikat melakukan Embargo Ekonomi terhadap Korea Utara?
2. Bagaimana Korea Utara mengembangkan senjata Nuklir?
3. Bagaimana kondisi ekonomian Korea Utara pasca diberlakukannya sanksi embargo oleh amerika serikat dalam rentan waktu 2017-2020?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian profesi ini lebih terfokus. Dalam hal ini, Penulis membuat batasan masalah pada kajian perekonomian Korea Utara pasca diberlakukannya sanksi embargo oleh Amerika Serikat pada periode 2017 - 2020.

1.2.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada Latar Belakang dan Identifikasi Masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah “Bagaimana dampak sanksi embargo ekonomi Amerika Serikat 2017-2020 terhadap uji coba nuklir teRhadap perekonomian Korea Utara ?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut ini tujuan dan kegunaan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui awal mula perkembangan Nuklir di korea utara.
2. Untuk mengetahui mengapa Amerika Serikat melakukan Embargo ekonomi terhadap Korea Utara pada 2017.
3. Untuk mengetahui kondisi perekonomian Korea Utara pasca sanksi embargo oleh amerika serikat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditulis oleh penulis, adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Strata-Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung.
2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademis pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya.
3. Secara khusus memberikan informasi kepada pembaca mengenai dampak sanksi embargo Amerika Serikat terhadap perekonomian di Korea Utara 2017-2020.